This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Desa Sejahtera Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara

Agus Sikwan

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Tanjungpura Indonesia

E-mail: agus.sikwan@fisip.untan.ac.id

Abstract

The title of this research is : “The Empowerment Programe Model of the Poor Society in Sungai Raya Subdistrict which at Bengkayang Regency of West Borneo Province”. Background overshadow by writer desire to lay open until where program the Economic Empowerment of Coastal area Society (EECS) specially to fisherman Society which have been programmed by ambulatory Regency Government. Internal issue formulation this research is “What will be implementation process program the Economic Empowerment of Coastal area Society (EECS) at Sungai Raya Sub district, Regency Bengkayang ? Research Type use qualitative and technique of data collecting use the in-depth interview and observation. While data analysis use descriptive analysis. Program EECS at Sungai Raya Subdistrict of Regency Bengkayang to in implementation of since year 2007 is not re-continued. This matter because of some problems and factor influencing its implementation, so that program the EECS 2007 is even transferred to Regency area/other Subdistrict. Therefore, need the correct stages: steps and quickly in handling it, is good the than Government of Regency of Bengkayang and also institution or institute which have competence of so that program EECS earn the implementation and re-continued, because very needed by fisherman society specially in Sungai Raya Subdistrict.

Key word : *Partisipation, Empowerment and Fisherman Society*

PENDAHULUAN

Desa Sejahtera merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) yang perekonomiannya masyarakatnya tergantung pada sektor perikanan, pertanian dan perkebunan. Adapun masyarakat yang bekerja pada tiga sektor tersebut (perikanan, pertanian dan perkebunan) rata-rata hidupnya di bawah garis kemiskinan (pra sejahtera).

Meskipun berbagai program pemberdayaan masyarakat nelayan di Desa Sejahtera dalam rangka mengentaskan kemiskinan telah dilakukan oleh pemerintah daerah setempat pada desa-desa tertinggal di kawasan pesisir Kecamatan Sukadana (seperti program Inpres Desa Tertinggal (IDT), program Jaring Pengaman Sosial (JPS), program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP), dan program-program lainnya, dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat nelayan di desa Sejahtera, namun demikian hasilnya masih jauh dari memuaskan, dalam arti upaya tersebut masih belum mampu untuk mengatasi masalah kemiskinan yang dirasakan oleh masyarakat nelayan di Desa Sejahtera Kecamatan Sukadana. Sifat program yang seragam dan sentralistik, pendekatan birokrasi yang bersifat *top down* serta berorientasi pada target, seringkali menjadi penyebab kegagalan berbagai program pemberdayaan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Desa Sejahtera Kecamatan Sukadana. Upaya pengentasan masyarakat miskin melalui berbagai program pemberdayaan yang telah dilakukan oleh pemerintah setempat seringkali kurang sesuai dengan apa yang menjadi

kebutuhan nyata masyarakat nelayan di kawasan pesisir atau kelompok sasaran sebagai penerima program. Ketidaksesuaian antara apa yang menjadi keinginan warga masyarakat nelayan di kawasan pesisir dengan apa yang hendak dicapai program. Ketidaksesuaian ini selanjutnya menyebabkan program gagal dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat nelayan di kawasan pesisir, dan keberlanjutan dari program tersebut.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang penulis lakukan di lapangan, maka dapat diketahui bahwa kegagalan dalam pelaksanaan berbagai program pemberdayaan tersebut antara lain disebabkan oleh karena program-program itu tidak disosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat nelayan di Desa Sejahtera Kecamatan Sukadana, sehingga partisipasi masyarakat nelayan di Desa Sejahtera Kecamatan Sukadana dalam berbagai kegiatan program relatif sangat kurang. Di samping itu juga, dalam pelaksanaan berbagai program pemberdayaan masyarakat nelayan di Desa Sejahtera Kecamatan Sukadana yang dilakukan oleh pemerintah setempat juga dihadapkan pada kendala lain. Kendala tersebut muncul antara lain mulai dari pendataan warga masyarakat miskin yang bermukim di Desa Sejahtera Kecamatan Sukadana, pemilihan jenis kegiatan tanpa musyawarah, keterbatasan informasi pasar, rendahnya akses terhadap teknologi pertanian, kesulitan pemasaran hasil kegiatan usaha yang telah dilakukan oleh warga masyarakat desa, dan tidak dilibatkannya partisipasi warga masyarakat dalam proses pelaksanaan program baik dalam proses perencanaan program maupun dalam

pengambilan keputusan. Terbaikannya masyarakat nelayan di kawasan pesisir (kelompok sasaran) sebagai penerima program untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan program dan dalam proses pembuatan keputusan, selanjutnya berdampak pada kegagalan berbagai program tersebut dalam upaya untuk melanjutkan program pada masa yang akan datang. Kegagalan tersebut disebabkan oleh ketidaksesuaian berbagai program pemberdayaan dalam rangka mengentaskan kemiskinan yang dilaksanakan dengan kebutuhan masyarakat nelayan di kawasan pesisir, rendahnya daya serap masyarakat nelayan di kawasan pesisir terhadap program, dan tidak adanya rasa memiliki terhadap program itu.

Pada umumnya pelaksanaan berbagai program pemberdayaan masyarakat nelayan di kawasan pesisir merupakan strategi dalam paradigma pembangunan yang bertumpu pada masyarakat nelayan itu sendiri. Strategi ini menyadari pentingnya kapasitas masyarakat nelayan untuk dapat meningkatkan kemandirian dan kekuatan internal yang dimilikinya melalui retribusi modal yang diberikan oleh pemerintah kepadanya. Ketidakberhasilan pelaksanaan berbagai program pemberdayaan masyarakat nelayan di Desa Sejahtera Kecamatan Sukadana dalam rangka mengentaskan kemiskinan yang selama ini dilakukan oleh pemerintah setempat, perlu kiranya dilakukan perubahan, yaitu dari strategi program pemberdayaan pengentasan kemiskinan yang berorientasi pada target dan bersifat sentralistik (*top-down*), haruslah dirubah dengan strategi pemberdayaan yang pelaksanaannya lebih ditekankan kepada pendekatan

partisipatif dan bersifat *bottom-up*.

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : “Bagaimanakah pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat pesisir yang selama ini dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Kayong Utara (pemerintah setempat) di Kecamatan Sukadana dan faktor-faktor apakah yang mempengaruhi program tersebut?”.

Berbicara tentang masalah pemberdayaan masyarakat nelayan, maka hal ini tidak terlepas dari masalah kemanusiaan, karena kedua masalah ini saling berkaitan erat antara satu dengan yang lainnya. Dalam upaya pemberdayaan masyarakat nelayan, maka pada hakekatnya masyarakat nelayan dapat diberdayakan melalui ilmu pengetahuan dan kemandirian sehingga mereka mampu berperan sebagai subjek dalam kegiatan pemberdayaan bukan sebagai objek dari kegiatan pemberdayaan tersebut. Menurut Pranarka dan Vidhyandika (1996: 54) yang penting adalah memberikan “*power*” kepada yang “*powerless*”, karena hanya apabila memiliki *power* maka mereka akan dapat melaksanakan proses aktualisasi eksistensi.

Menurut Chambers (1987: 142), bahwa pemberdayaan (*empowerment*) sebagai sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial, konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yaitu bersifat “*people centered participatory, empowering and sustainable*”. Sejalan dengan hal itu, Friedman (1992) mengatakan bahwa konsep pemberdayaan ini disebut sebagai suatu konsep pembangunan alternatif yang

dalam proses pembangunan menghendaki adanya *inclusive democracy, appropriate economic growth, gender equality and intergenerational equity*.

Dalam pada itu, Kartasasmita (1997: 28) menjelaskan bahwa upaya memberdayakan masyarakat haruslah pertama-tama dimulai dengan menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Dipandang dari kacamata sosiologi, Adimihardja (Hikmat, 2001: ix) mengatakan bahwa pemberdayaan adalah upaya untuk menampilkan peran-peran aktif dan kolaboratif antara masyarakat dan mitranya. Secara paradoks, memberdayakan sistem lain, atau secara paternalistik melimpahkan kekuatan (*power*) kepada orang lain dapat juga berarti memberdayakan.

Menurut Sumudiningrat (1999: 254) pemberdayaan masyarakat (*empowerment society*) berarti: Meningkatkan kemampuan atau meningkatkan kemandirian masyarakat. Dalam kerangka pembangunan nasional, upaya pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari sudut pandang: *pertama*, penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan masyarakat berkembang; *kedua*, peningkatan kemampuan masyarakat dalam membangun melalui bantuan dana, pelatihan, pembangunan prasarana dan sarana baik fisik maupun sosial, serta pengembangan kelembagaan di daerah; *ketiga*, perlindungan melalui pemihakan kepada yang lemah untuk mencegah persaingan yang tidak seimbang, dan menciptakan kemitraan yang saling menguntungkan.

Sedangkan menurut Sumaryadi (2005: 94-96), bahwa secara konseptual

ada lima prinsip dasar dari konsep pemberdayaan masyarakat, yaitu sebagai berikut:

Pertama, untuk mempertahankan eksistensinya, pemberdayaan masyarakat memerlukan *break-even* dalam setiap kegiatan yang dikelola. **Kedua**, konsep pemberdayaan masyarakat selalu melibatkan partisipasi masyarakat baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan yang dilakukan. **Ketiga**, dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat, antara kegiatan pelatihan dan pembangunan fisik (termasuk di dalamnya kegiatan pengembangan usaha), merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. **Keempat**, dalam mengimplementasikan konsep pemberdayaan harus dapat memaksimalkan sumber daya (*resources*), khususnya dalam hal dana, baik yang berasal dari pemerintah, swasta, maupun sumber-sumber lainnya, seperti donasi dan sponsor pembangunan sosial. **Kelima**, kegiatan pemberdayaan masyarakat harus lebih memfungsikan diri sebagai ‘katalis’ yang menghubungkan antara kepentingan pemerintah yang bersifat makro, dan kepentingan masyarakat yang bersifat mikro.

Berdasarkan berbagai konsep pemberdayaan masyarakat sebagaimana tersebut di atas, maka dapat ditegaskan bahwa pemberdayaan masyarakat terkait dengan pemberian akses bagi masyarakat, lembaga, dan organisasi masyarakat dalam memperoleh dan memanfaatkan hak masyarakat bagi peningkatan kehidupan ekonomi, sosial dan politik. Oleh sebab itu, pemberdayaan masyarakat sangatlah penting untuk

mengatasi ketidakmampuan masyarakat yang disebabkan oleh keterbatasan akses, kurangnya pengetahuan dan keterampilan, serta adanya kondisi kemiskinan yang dialami oleh sebagian masyarakat.

Berbicara tentang masalah pemberdayaan masyarakat nelayan di kawasan pesisir, maka hal ini tidak terlepas dari masalah kemiskinan yang dialami oleh kelompok masyarakat nelayan yang bersangkutan. Oleh karena itu, maka dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat nelayan di kawasan pesisir haruslah dapat memilih strategi yang tepat dan akurat agar kemiskinan yang dialami masyarakat nelayan dapat teratasi serta mereka dapat hidup mandiri tanpa tergantung lagi kepada pihak lain, yang pada gilirannya mereka dapat untuk mengembangkan dirinya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

Dalam pandangan Soedjatmoko (1984: 35-45), pembangunan harus dilakukan sendiri oleh kelompok sasaran pembangunan, guna meningkatkan kemampuannya (pembangunan dari bawah). Di samping itu pembangunan dari bawah juga menumbuhkan kepemimpinan dan inisiatif yang berasal dari tingkat masyarakat paling bawah (*grassroots*).

Sehubungan dengan hal itu, maka dapat dikatakan bahwa antusiasisme pembangunan yang ada dalam masyarakat dapat dikatakan sebagai ekspresi dari pembangunan yang berasal dari bawah. Inisiatif masyarakat bawah berkaitan dengan inovasi atau penggunaan kembali teknologi yang tepat bagi usaha skala kecil dan aktivitas penggunaan tenaga kerja dalam lingkungan sumber daya yang miskin.

Namun demikian, salah satu ciri yang sangat mencolok yang terdapat di negara berkembang adalah sangat besarnya kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa (negara atau lembaga negara) dalam mengatur kehidupan masyarakat. Pemusatan kekuasaan ini bertujuan untuk mempermudah pelaksanaan berbagai program pembangunan, yaitu dengan cara memusatkan pengelolaan dana, pemusatan pembuatan keputusan dan kebijakan, ataupun pemusatan pengendalian program pembangunan. Kenyataan ini disebabkan kemampuan yang dimiliki oleh pemerintah negara berkembang untuk mengelola pembangunan masih sangat kurang. Terbatasnya kemampuan negara berkembang untuk melaksanakan pembangunan, utamanya disebabkan oleh tingginya tingkat perbedaan dan kemiskinan dalam masyarakat. Kondisi yang demikian ini menjadi alasan pembenaran bagi sentralisasi kekuasaan pembangunan oleh negara atau lembaga negara.

Pemusatan kekuasaan pembangunan pada pihak pemerintah inilah yang dikritik oleh pembangunan dari bawah. Para pendukung model pembangunan dari bawah cenderung tidak mempercayai motif dan kemampuan pemerintah dan lembaga swasta. Keduanya seringkali justru mengeksploitasi masyarakat demi dan atas nama pembangunan. Padahal, menurut mereka, masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) memiliki potensi untuk memberdayakan para anggotanya dan memecahkan persoalan yang dihadapi melalui inisiatif bersama yang mandiri (Esman, 1991: 30). Berdasarkan pengalaman ini, maka dalam kaitannya dengan pelaksanaan program pemberdayaan menjadi sangat penting

melibatkan unsur kelembagaan lain di luar sektor pemerintah maupun swasta, yaitu masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat.

Sejalan dengan hal itu, maka pemberian kekuasaan kepada masyarakat nelayan untuk mengendalikan kehidupan dan sumber daya alam di daerah mereka sendiri, untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya dari sumber daya alam itu dan untuk mengarahkan serta mengembangkan diri mereka sebagai manusia, merupakan tujuan yang hendak dicapai dari program pemberdayaan masyarakat nelayan dikawasan pesisir yang memberikan kebebasan masyarakat nelayan untuk berpartisipasi aktif secara luas dan sekaligus sebagai sarana untuk mencapainya.

Pembangunan yang berpusat pada masyarakat dengan memberikan kebebasan masyarakat untuk berpartisipasi aktif secara luas lebih menekankan pemberdayaan (*empowerment*), yang memandang inisiatif-kreatif dari masyarakat sebagai sumber daya utama dalam pembangunan dan memandang kesejahteraan material dan spritual sebagai tujuan yang akan dicapai proses pembangunan tersebut.

Dalam pada itu, Korten (1992) menyatakan bahwa ada tiga dasar perubahan struktural dan normatif dalam pembangunan yang berpusat pada rakyat, yakni :

- (1) Memusatkan pemikiran dan tindakan kebijakan pemerintah pada penciptaan keadaan-keadaan yang mendorong dan mendukung usaha rakyat untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri dan untuk memecahkan masalah mereka sendiri pada tingkat individual,

keluarga, dan komunitas.

- (2) Mengembangkan struktur dan proses organisasi yang berfungsi menurut kaidah-kaidah sistem swaorganisasi.
- (3) Mengembangkan sistem-sistem produksi-konsumsi yang diorganisasi secara teritorial yang berlandaskan pada kaidah-kaidah kepemilikan dan pengendalian lokal.

Selanjutnya menurut Tjokrowinoto (1987: 44) bahwa ciri-ciri pokok pendekatan pembangunan yang berpusat pada manusia adalah: Keputusan dan inisiatif untuk memenuhi kebutuhan rakyat dibuat di tingkat lokal, yang di dalamnya rakyat memiliki identitas dan peranan yang dilakukan sebagai partisipan yang dihargai; Fokus utamanya adalah memperkuat kemampuan rakyat miskin dalam mengawasi dan mengarahkan aset-aset untuk memenuhi kebutuhan yang khas menurut daerah mereka sendiri; Pendekatan ini mempunyai toleransi terhadap perbedaan dan karenanya mengakui arti penting pilihan nilai individual dan pembuatan keputusan yang terdistribusi; Dalam melaksanakan pembangunan, pendekatan ini menekankan pada proses *social learning* yang di dalamnya terdapat interaksi kolaboratif antara birokrasi dan komunitas mulai dari proses perencanaan sampai evaluasi proyek dengan mendasarkan diri pada saling belajar; Budaya kelembagaan ditandai adanya organisasi yang mengatur diri sendiri dan lebih terdistribusi, yang menandai unit-unit lokal yang mengelola diri sendiri, yang berinteraksi satu sama lain guna memberikan umpan balik pelaksanaan yang cepat dan kaya kepada semua tingkat organisasi yang

membantu tindakan koreksi diri. Dengan demikian keseimbangan yang lebih baik antara struktur vertikal dan horisontal dapat terwujud. Proses pembentukan jaringan koalisi dan komunikasi antara birokrasi dengan lembaga lokal (Lembaga swadaya Masyarakat), satuan-satuan organisasi tradisional yang mandiri, merupakan bagian integral dari pendekatan ini, baik untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengidentifikasi dan mengelola berbagai sumber, maupun untuk menjaga keseimbangan antara struktur vertikal dan horisontal.

Dari berbagai pemikiran tentang strategi pembangunan dalam mengatasi kemiskinan yang dialami masyarakat sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka strategi pembangunan yang berorientasi pada masyarakat nelayan, terutama dengan memberikan kebebasan kepada masyarakat nelayan untuk berpartisipasi aktif secara luas merupakan strategi pemberdayaan masyarakat nelayan yang paling tepat dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Strategi ini cenderung memandang nelayan bukan sekedar objek pembangunan, tetapi pemilik utama program pembangunan.

Pada umumnya masalah kemiskinan masyarakat nelayan merupakan suatu fenomena sosial. Permasalahan kemiskinan yang dialami masyarakat nelayan menjadi lebih luas lagi dengan semakin dirasakan beratnya akibat buruk yang dialami kelompok-kelompok nelayan karena berbagai bencana yang terjadi, baik itu berupa bencana alam maupun bencana sebagai akibat ulah manusia itu sendiri. Kondisi seperti inilah yang menyebabkan kemiskinan yang dialami oleh masyarakat nelayan.

Menurut Kaplan (1967: 149-151),

bahwa kemiskinan yang dialami suatu masyarakat tertentu merupakan fenomena sosial yang multidimensional. Artinya kemiskinan tidak hanya berkaitan dimensi ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan dimensi struktural, psikologis, kultural, ekologis dan sebagainya. Demikian pula halnya dengan fenomena dari kondisi kemiskinan yang dialami masyarakat nelayan, tidak hanya berkaitan dengan rendahnya tingkat kesejahteraan dan kekurangan sumber daya semata, tetapi juga harus dikaitkan dengan faktor-faktor lainnya (Turton, 2003; Tjokrowinoto, 1995). Namun demikian yang menjadi masalah adalah hingga saat ini belum ada kesamaan pendapat di kalangan para pakar tentang penyebab kemiskinan suatu masyarakat, termasuk kemiskinan yang dialami masyarakat nelayan beserta parameter pengukurannya.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka di dalam penerapan strategi penanganan masalah kemiskinan yang dialami masyarakat nelayan, di samping diperlukan strategi yang tepat, juga perlu diperhatikan sejumlah faktor yang selama ini terabaikan, yaitu memahami hakekat dan profil kemiskinan masyarakat nelayan itu sendiri. Perlu disadari bahwa fenomena masalah kemiskinan masyarakat nelayan merupakan sesuatu yang kompleks, berdimensi banyak, dan memiliki variasi yang amat besar yang tidak akan terungkap melalui angka-angka statistik semata. Kegagalan dalam memahami dan menghayati hakekat dan profil kemiskinan masyarakat nelayan, pada akhirnya menghasilkan kebijakan dan strategi penanganan kemiskinan masyarakat nelayan yang salah, sehingga kebijakan tersebut tidak efektif.

Menurut Tjokrowinoto (1992: 112-115) ada tujuh profil kemiskinan, yaitu:

Pertama, kemiskinan bukanlah masalah kesejahteraan belaka, tetapi juga masalah kerentanan (*vulnerability*). **Kedua**, masalah kemiskinan adalah masalah *powerlessness* (ketidakberdayaan), yaitu perasaan impotensi emosional dan sosial menghadapi elit desa dan para birokrat yang menentukan keputusan yang menyangkut dirinya, tanpa memberi kesempatan untuk mengaktualisasikan dirinya; ketidakberdayaan menghadapi penyakit dan kematian, kekumuhan dan kekotoran. **Ketiga**, kemiskinan juga berarti tertutupnya akses kepada berbagai peluang kerja, karena hubungan produksi dalam masyarakat tidak memberi peluang bagi mereka untuk berpartisipasi dalam proses produksi. Ini disebabkan posisi tawar menawar mereka dalam struktur hubungan produksi amat lemah. **Keempat**, kemiskinan juga berarti menghabiskan semua atau bagian terbesar dari penghasilannya untuk konsumsi pangan dalam kuantitas dan kualitas yang terbatas, sehingga konsumsi gizi amat rendah yang kemudian berakibat pada produktivitas yang rendah. **Kelima**, kemiskinan juga ditandai oleh tingginya *dependency ratio*, karena besarnya keluarga, dan beberapa diantaranya masih balita. **Keenam**, kemiskinan juga dapat terwujud dalam bentuk rendahnya akses pada pasar, karena aksesibilitas yang rendah dan kondisi alam yang miskin. Dan **Ketujuh**, kemiskinan juga terefleksikan dalam budaya kemiskinan yang diwariskan dari satu generasi ke generasi yang lain.

Dengan melihat beragamnya

profil kemiskinan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa fenomena kemiskinan yang dialami masyarakat nelayan secara langsung atau tidak langsung berkaitan pula dengan profil kemiskinan tersebut di atas, karena kemiskinan yang dialami masyarakat nelayan amatlah kompleks dan bersifat multidimensional. Oleh karenanya, meskipun pola penanganan kemiskinan masyarakat nelayan melalui *welfare strategy* dan *charity strategy* tidaklah memadai, tetapi justru di Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten-Kabupaten lainnya di Propinsi Kalbar hal itu dilaksanakan. Penanganan masalah kemiskinan masyarakat nelayan hanya dapat dilakukan apabila pembuat kebijakan mampu memilih strategi pemberdayaan yang tepat, memahami dan menghayati benar hakekat kemiskinan masyarakat nelayan, serta mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penyebab kemiskinan tersebut.

Program pemberdayaan memandang kemiskinan yang dialami masyarakat nelayan adalah sebagai situasi serba kekurangan yang terjadi bukan hanya dikehendaki oleh masyarakat nelayan itu sendiri, melainkan karena tidak dapat dihindari dengan kekuatan yang ada padanya, dan cenderung melihat kemiskinan masyarakat nelayan pada dimensi struktural. Artinya terjadinya kemiskinan masyarakat nelayan lebih banyak disebabkan oleh faktor-faktor struktural dalam masyarakat. Di sini kemiskinan masyarakat nelayan antara lain ditandai oleh sikap dan tingkah laku yang menerima keadaan yang seakan-akan tak dapat diubah, yang tercermin di dalam lemahnya kemauan untuk maju, ketidakmampuan mengadopsi teknologi, rendahnya

kualitas sumber daya yang dimiliki, rendahnya produktivitas, lemahnya nilai tukar hasil produksi, terbatasnya modal yang dimiliki, rendahnya pendapatan, dan terbatasnya kesempatan berpartisipasi dalam setiap kegiatan program yang ada.

Pelaksanaan program pemberdayaan merupakan perluasan dan peningkatan berbagai program dan upaya penanganan kemiskinan masyarakat nelayan yang pernah dilakukan sebelumnya dan ditujukan langsung untuk menangani masalah kemiskinan masyarakat nelayan di tempat mereka berada. Melalui program pemberdayaan, berbagai upaya penanganan masyarakat nelayan di kawasan pesisir yang telah ada dan dilaksanakan selama ini, seperti program IDT, JPS, PEMP, dan berbagai program lainnya yang dilaksanakan oleh pihak Pemerintah Kabupaten Kayong Utara, selanjutnya akan diintegrasikan.

Dalam pada itu, pemanfaatan dana program pemberdayaan pada dasarnya diserahkan langsung kepada warga masyarakat nelayan itu sendiri, karena merekalah yang paling mengetahui usaha yang mereka lakukan dan kebutuhan apa yang paling mendesak, dengan bimbingan dan pengarahan dari pihak pemerintah setempat. Tata cara penyaluran dana program pemberdayaan dibuat sederhana sehingga warga masyarakat nelayan yang menjadi kelompok sasaran program dapat dengan mudah memahami dan menggunakannya.

Tujuan program pemberdayaan adalah selain untuk menciptakan suasana keserasian sosial, juga untuk mempercepat upaya mengurangi masyarakat nelayan yang hidup dalam kemiskinan. Secara lebih khusus,

sasaran program pemberdayaan adalah meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat nelayan melalui upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) warga masyarakat nelayan, peningkatan kemampuan permodalan, pengembangan usaha bersama mereka. Program pemberdayaan dimaksudkan untuk menanggulangi situasi dan kondisi yang menyebabkan timbulnya masalah kemiskinan yang dihadapi masyarakat nelayan.

Dampak yang diharapkan dari program pemberdayaan ini adalah penguatan (pemberdayaan) kehidupan diri pribadi masyarakat nelayan. Hal ini diharapkan dapat dicapai melalui empat jalur, yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan permodalan, pengembangan peluang kerja dan berusaha, dan penguatan lembaga sosial milik warga masyarakat nelayan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia serta kemampuan permodalan dalam kelembagaan kelompok yang berkembang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat nelayan, diharapkan akan dapat memperkuat kemampuan usaha mereka yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya dan keluarganya.

Untuk itu, pendekatan yang dianggap paling tepat untuk digunakan dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat nelayan di kawasan pesisir adalah pendekatan keterpaduan, kegotongroyongan, keswadayaan, partisipatif, dan terdesentralisasi, yang maknanya sebagai berikut:

- a. Keterpaduan, yaitu mengarahkan kegiatan pembangunan secara lintas sektoral dan lintas daerah serta

meletakkan upaya penanggulangan kemiskinan sebagai bagian dari proses pembangunan yang menyeluruh dan terpadu.

- b. Kegotongroyongan, yaitu menumbuhkan rasa kebersamaan, yang lebih kuat membantu yang lemah, sehingga menciptakan kesejahteraan merata.
- c. Keswadayaan, yaitu menitikberatkan pada kegiatan usaha yang berdasarkan kemandirian.
- d. Partisipatif, yaitu melibatkan warga masyarakat, khususnya kelompok sasaran, dalam pengambilan keputusan sejak perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pemanfaatan hasilnya sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat itu sendiri.
- e. Terdesentralisasi, yaitu menurunkan wewenang pembuat keputusan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kepada aparat pemerintah yang terdekat dengan kelompok sasaran (Tjokrowinoto, 1991: 125-130).

Pendekatan yang demikian ini menunjukkan bahwa program pemberdayaan berkeinginan untuk menumbuhkan kemampuan masyarakat nelayan dalam mengelola kegiatan program yang ditujukan untuk dirinya. Melalui program pemberdayaan, masyarakat nelayan diajak untuk mengelola kegiatan program yang menjadi kebutuhannya, sehingga mereka memperoleh pengalaman dan keterampilan baru yang pada gilirannya

dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya dan keluarganya.

Menurut Esman dan Uphoff (1984: 15-16), keterlibatan partisipasi masyarakat merupakan inti dari pembangunan pada suatu daerah, partisipasi merupakan salah satu wujud dari tanggungjawab masyarakat terhadap pembangunan, beragamnya kepentingan dan kebutuhan di antara masyarakat membutuhkan organisasi pelaksana pembangunan yang berbeda, dan kebutuhan terhadap organisasi pembangunan yang sesuai bagi tujuan maupun lingkungan khusus (masyarakat di wilayah tertentu).

Dalam konteks program pemberdayaan masyarakat nelayan di kawasan pesisir Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara, partisipasi masyarakat nelayan dalam kegiatan program pemberdayaan menjadi sangat penting. Partisipasi tidak hanya dipandang sebagai tujuan dari upaya penanganan, tetapi yang lebih penting lagi adalah sebagai ukuran keberhasilan dari strategi pemberdayaan. Kegagalan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat nelayan pada masa lalu, dapat dikaitkan dengan tidak adanya partisipasi masyarakat nelayan dalam program pemberdayaan tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka program pemberdayaan yang berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) masyarakat nelayan, dalam pelaksanaannya sangat mensyaratkan keterlibatan langsung dari masyarakat nelayan sebagai penerima program pemberdayaan (partisipasi masyarakat nelayan dalam program pemberdayaan). Karena hanya dengan partisipasi masyarakat nelayan sebagai penerima program, maka hasil pemberdayaan itu akan sesuai dengan

aspirasi dan kebutuhan masyarakat nelayan itu sendiri. Dengan adanya kesesuaian ini maka hasil dari program pemberdayaan akan memberikan manfaat yang optimal bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat nelayan. Hal ini sejalan dengan pendapat Korten (1986: 50), yang mengatakan bahwa salah satu indikator keberhasilan pembangunan adalah adanya partisipasi masyarakat penerima program. Demikian pula halnya dengan penanganan masyarakat nelayan melalui program pemberdayaan sebagai proses peningkatan kemampuan masyarakat nelayan untuk menentukan masa depannya, mengandung arti bahwa partisipasi masyarakat nelayan perlu dilibatkan dalam proses tersebut. Di sini masyarakat nelayan perlu diberikan kekuasaan untuk berpartisipasi dalam kegiatan program pemberdayaan yang merupakan salah satu program pembangunan.

Terdapat beberapa alasan pembenar, seperti yang dikemukakan oleh Tjokrowinoto (1987: 40), bahwa pentingnya partisipasi masyarakat yakni :

- a. Rakyat adalah fokus sentral dan tujuan terakhir pembangunan, partisipasi merupakan akibat logis dari dalil tersebut;
- b. Partisipasi menimbulkan harga diri dan kemampuan pribadi untuk dapat turut serta dalam keputusan penting yang menyangkut masyarakat;
- c. Partisipasi menciptakan suatu lingkaran umpan balik arus informasi tentang sikap, aspirasi, kebutuhan dan kondisi daerah yang tanpa keberadaannya akan tidak terungkap. Arus informasi ini tidak dapat dihindari untuk berhasilnya pembangunan;

- d. Pembangunan dilaksanakan lebih baik dengan dimulai dari di mana rakyat berada dan dari apa yang mereka miliki;
- e. Partisipasi memperluas zone (wawasan) penerimaan proyek pembangunan;
- f. Partisipasi akan memperluas jangkauan pelayanan pemerintah kepada seluruh masyarakat;
- g. Partisipasi menopang pembangunan;
- h. Partisipasi menyediakan lingkungan yang kondusif baik bagi aktualisasi potensi manusia maupun pertumbuhan manusia;
- i. Partisipasi merupakan cara yang efektif membangun kemampuan masyarakat untuk pengelolaan program pembangunan guna memenuhi kebutuhan khas daerah;
- j. Terakhir dan tidak kalah pentingnya, partisipasi dipandang sebagai pencerminan hak-hak demokratis individu untuk dilibatkan dalam pembangunan mereka sendiri;

Oleh karenanya dalam program pembangunan menurut Tjokrowinoto (1987: 43) perlu ditumbuhkan iklim dan kondisi yang mendukung partisipasi itu, seperti :

- (a). Strategi pembangunan diarahkan pada bagian rakyat miskin;
- (b). Adanya struktur kepemimpinan yang cocok;
- (c). Pembentukan kelompok di luar koperasi (kerjasama) yang berbasis pedesaan;
- dan (d). NGO-NGO (*Non Government Organization*) memainkan peranan yang bersifat mendukung .

Keadaan seperti ini nampaknya juga tersyaratkan pada pola penanganan masyarakat nelayan di Desa Sejahtera Kecamatan Sukadana melalui program pemberdayaan. Sehingga dapat dikatakan bahwa pola penanganan masyarakat nelayan melalui program pemberdayaan sangat mendukung tumbuhnya partisipasi masyarakat nelayan dalam pelaksanaan program pemberdayaan. Tanpa partisipasi masyarakat nelayan dapat dipastikan program pemberdayaan itu tidak akan berjalan dengan baik, bahkan dapat mengalami kegagalan.

Dalam kerangka proses pelaksanaan program, Grindle (1980: 7) menyebutkan adanya lima faktor penyebab keberhasilan ataupun kegagalan suatu pelaksanaan program, yaitu:

- (a). Masalah sumber daya yang tersedia guna mencapai tujuan program;
- (b). Struktur dan sistem pemerintahan di mana program itu dilaksanakan;
- (c). Komitmen aparat bawahan di dalam birokrasi;
- (d). Sistem perencanaan tujuan program ; dan
- (e). *Leverage* dari pihak oposan untuk memperoleh peluang yang sama dalam memanfaatkan hasil program.

Di samping kelima faktor itu, keberhasilan pelaksanaan program sangat ditentukan oleh isi program dan konteks pelaksanaan program. Variabel isi program, sangat berkaitan dengan kepentingan, suasana, tujuan yang hendak dicapai dan latar belakang yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam perumusan program.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan menggunakan metode kualitatif. Adapun yang dimaksud deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yang hasilnya menggambarkan objek penelitian yang berupa peristiwa atau gejala sosial secara apa adanya dengan melakukan analisis terhadapnya berdasarkan data yang diperoleh pada saat penelitian lapangan berlangsung.

Sedangkan yang dimaksud dengan metode kualitatif menurut Bogdan dan Taylor (1990: 3), adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan seperti ini diarahkan kepada latar belakang individu secara holistik atau utuh dan menyeluruh. Berdasarkan konsep di atas, pendekatan kualitatif dapat menggambarkan data dalam bentuk deskriptif dan menekankan keterlibatan peneliti secara aktif atau terbatas dalam proses penelitian dan sedapat mungkin harus memahami dunia empirik dari masyarakat nelayan yang akan diteliti.

Adapun yang dijadikan subjek penelitian adalah masyarakat nelayan yang bermukim di Desa Sejahtera Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara Propinsi Kalimantan Barat (Kalbar) yang selanjutnya disebut informan, dengan memiliki kriteria – kriteria sebagai berikut :

1. Kepala Keluarga (KK) dan memiliki tanggungan;
2. Penduduk asli setempat (tinggal menetap di kecamatan studi minimal 5 tahun);
3. Mampu mengungkapkan apa yang menjadi masalah yang akan diteliti;
4. Tamat SD (minimal bisa baca dan

tulis);

5. Pernah menjadi peserta dari salah satu program pembangunan yang pernah ada sebelumnya di kawasan pesisir yang telah dilaksanakan oleh pemerintah setempat dalam rangka pengentasan kemiskinan (seperti: program IDT, JPS, PEMP, dan lain-lain).

Sedangkan yang dijadikan informan pangkal dalam penelitian ini antara lain: Camat Sukadana, Kepala Desa, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan Pemuka Adat. Menurut Koentjaraningrat (1991: 164), informan pangkal adalah mereka yang mempunyai pengetahuan luas mengenai berbagai sektor dalam masyarakat serta mempunyai kemampuan untuk memperkenalkan kepada peneliti untuk menghubungi informan lain yang merupakan ahli tentang sektor-sektor masyarakat atau unsur-unsur yang ingin penulis ketahui.

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis deskriptif. Menurut Martodirdjo (1991: 85) analisis deskriptif adalah usaha untuk menyederhanakan dan sekaligus menjelaskan bagian dari keseluruhan langkah-langkah klasifikasi dan kategorisasi sehingga dapat tersusun suatu rangkaian deskripsi yang sistematis sehingga memperoleh suatu kesimpulan.

Pada penelitian ini penulis melakukan langkah-langkah kegiatan analisis data, yakni sebagai berikut : (1) reduksi data; (2) penyajian data; dan (3) penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, maka dapat diketahui bahwa

dalam pelaksanaan kegiatan dalam program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP), partisipasi kelompok masyarakat nelayan cenderung sangat tinggi, baik untuk kegiatan pertanian, peternakan, berdagang kecil-kecilan, budi daya ikan, kerajinan membuat jala/pukat, maupun di sektor jasa. Keterlibatan masyarakat nelayan yang tinggi pada tahap pelaksanaan kegiatan nampaknya telah menjadi kecenderungan pada setiap partisipasi masyarakat di dalam pembangunan.

Dengan melihat tingginya partisipasi dari kelompok masyarakat nelayan dalam pelaksanaan kegiatan program PEMP, menunjukkan bahwa program PEMP sebenarnya tidak berbeda dengan program-program penanganan nelayan lainnya. Partisipasi dalam program PEMP sebagian besar (90 %) hanya muncul pada saat pelaksanaan kegiatan. Sedangkan pada kegiatan program penanganan masyarakat nelayan yang lainnya (seperti program IDT, JPS, BLT dan lain lain), identifikasi masalah, pengambilan keputusan dan perencanaan kegiatan, partisipasi kelompok masyarakat nelayan sebagai kelompok sasaran tidak pernah ada.

Sehubungan dengan hal tersebut untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan program PEMP program pemberdayaan sangat menuntut adanya laporan yang berkaitan dengan kemajuan program maupun pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan. Adapun laporan dan pengawasan ini hanya dapat dilaksanakan apabila dilakukan kegiatan monitoring, baik oleh aparat pemerintah maupun anggota kelompok masyarakat nelayan itu sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara

mendalam yang penulis lakukan terhadap para informan di lapangan, maka dapat diketahui bahwa dalam monitoring kegiatan, partisipasi anggota kelompok masyarakat nelayan sangatlah kurang bahkan tidak ada sama sekali. Dengan melihat kurangnya partisipasi masyarakat nelayan dalam monitoring kegiatan, menunjukkan aktivitas monitoring tidak banyak melibatkan anggota kelompok masyarakat nelayan sebagai pelaksana program. Kegiatan monitoring tersebut, berdasarkan penjelasan dari ketua KMP warga nelayan yang juga merupakan peserta program PEMP, hampir seluruhnya dilakukan oleh pihak pemerintah setempat dalam hal ini adalah dipercayakan kepada aparat dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kayong Utara.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan dan wawancara mendalam dengan para informan, maka dapat diketahui bahwa partisipasi masyarakat nelayan dalam evaluasi kegiatan juga sangat kurang sama halnya dengan monitoring kegiatan program. Kenyataan ini menggambarkan bahwa partisipasi masyarakat nelayan dalam proses pemberdayaan yang ditujukan kepada mereka sangat terbatas, yakni hanya pada tahap pelaksanaan kegiatan program PEMP saja, sedangkan pada tahap lainnya seperti monitoring dan evaluasi kegiatan mereka hampir tidak dilibatkan sama sekali.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam yang penulis lakukan dengan informan dan informan kunci di lapangan, maka dapat diketahui bahwa faktor pendukung dalam pelaksanaan program PEMP di Desa Sejahtera Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalbar, yakni antara lain:

- 1). Penyelenggaraan program PEMP mendapat sambutan yang sangat antusias dari masyarakat pesisir, karena melalui program PEMP ini mereka memiliki harapan bahwa tingkat kesejahteraan keluarga mereka akan mengalami peningkatan dari sebelumnya;
- 2). Masyarakat pesisir (nelayan) termasuk dalam kategori tidak mampu, maka dengan adanya penyelenggaraan program PEMP yang langsung membawa dana segar berupa dana ekonomi produktif, memberikan peluang kepada masyarakat pesisir selaku Kelompok Masyarakat Pemanfaat (KMP) untuk meningkatkan atau melengkapi sarana dan prasarana kegiatan usaha mereka yang selama ini mereka butuhkan;
- 3). Program PEMP diselenggarakan kepada kelompok masyarakat pemanfaat terlebih dahulu telah diberikan sosialisasi dan pelatihan sehingga mereka dapat melaksanakan program secara efektif dan efisien.
- 4). Bantuan dana ekonomi produktif yang dipinjamkan kepada kelompok masyarakat pemanfaat (masyarakat pesisir) dalam realisasinya benar-benar digunakan sesuai dengan kebutuhan dan pengembaliannya secara diangsur tanpa ada bunga;
- 5). Kelompok masyarakat pemanfaat umumnya sudah memiliki jenis pekerjaan sesuai dengan yang diusulkannya, sehingga kehadiran dana ekonomi produktif hanya berfungsi untuk meningkatkan modal usaha mereka;
- 6). Penyelenggaraan program PEMP yang pengaturannya dilakukan oleh pemerintah setempat (Pemkab

KKU) dengan melibatkan Dinas Kelautan dan Perikanan KKU serta manajemen konsultan sangat membantu masyarakat pesisir dalam menyelenggarakan administrasi dan dalam berbagai kesulitan yang dihadapi KMP melakukan pengorganisasian;

- 7). Pihak-pihak yang terlibat dalam program PEMP sangat mendukung dan proaktif dalam mensukseskan program ini, seperti aparat Pemkab KKU, Dinas Kelautan dan Perikanan KKU, manajemen konsultan, mitra desa dan lain-lainnya. Kondisi ini menimbulkan adanya semangat baru bagi masyarakat pesisir bahwa program yang dijalankan itu benar-benar ditangani secara serius.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam yang penulis lakukan dengan informan dan informan kunci di lapangan, maka dapat diketahui bahwa faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan program PEMP yakni antara lain :

- a). Belum adanya kebijakan atau peraturan khusus yang mengatur tentang program PEMP, sehingga dalam pelaksanaannya penuh kesimpangsiuran;
- b). Lebih dominannya aparat Pemkab KKU bekerjasama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan KKU dalam mengatur dan menentukan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam program PEMP, sehingga masyarakat pesisir (nelayan) selaku KMP tidak memiliki kebebasan dalam memilih kegiatan usaha yang sesuai dengan kemampuannya. Sehingga ada kesan dimasyarakat bahwa program PEMP adalah milik aparat pemerintah bukan milik masyarakat nelayan.

- c). Belum optimalnya dukungan kebijakan Pemerintah propinsi (Pemprop) Kalbar dan Pemerintah kabupaten (Pemkab) Kayong Utara dalam melakukan pembinaan terhadap aparat pemerintah, petugas teknis terkait di lapangan dan penggunaan dana operasional.
- d. Kurangnya koordinasi antara pihak pemerintah setempat (aparat Pemkab KKU) dengan instansi teknis terkait (Dinas Kelautan dan Perikanan KKU, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa KKU) dan organisasi sosial kemasyarakatan lainnya, sehingga ada kesan bahwa kegiatan program PEMP berjalan sendiri-sendiri.
- e). Adanya kemacetan dan tertundanya pengembalian dana ekonomi produktif PEMP sehingga proses perguliran dana untuk Kelompok Masyarakat Pemanfaat (KMP) berikutnya menjadi terhambat, dan akhirnya pelaksanaan program PEMP menjadi tidak berlanjut.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana yang telah dipaparkan di muka, maka untuk penelitian ini dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

Pelaksanaan program PEMP bagi warga masyarakat nelayan di Desa Sejahtera Kecamatan Sukadana yang dilakukan oleh Pemkab Kayong Utara selama ini merefleksikan pemiskinan secara sistematis dan bersama-sama dengan strategi institusi sosial yang mengabaikan hakekat dari pemberdayaan sosial, dan cenderung mengakibatkan keadaan masyarakat nelayan di kawasan pesisir menjadi

semakin tidak berdaya dalam upaya mereka meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

Dalam pelaksanaan program PEMP di Desa Sejahtera Kecamatan Sukadana, tidak terdapat peluang dan kesempatan yang diberikan oleh aparat Pemkab Kayong Utara kepada semua masyarakat nelayan di kawasan pesisir sebagai peserta program untuk berpartisipasi aktif secara luas dalam mengelola program PEMP tersebut. Keadaan ini pada dasarnya menyebabkan masyarakat nelayan di kawasan pesisir tidak memiliki kesempatan untuk belajar, serta mengungkapkan aspirasi, merealisasikan dan mengaktualisasikan kebutuhan dan keinginannya terhadap program PEMP yang ditujukan kepadanya. Aparat Pemkab Kayong Utara dalam pelaksanaan program PEMP cenderung menciptakan dan melestarikan ketidakberdayaan kelompok masyarakat nelayan di kawasan pesisir, guna menciptakan ketergantungan dan mempertahankan kekuasaan yang dimilikinya.

Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program PEMP di Desa Sejahtera Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara, yakni antara lain: (a) sambutan yang antusias dari masyarakat pesisir terhadap program PEMP; (b) bantuan dana ekonomi produktif yang dipinjamkan kepada Kelompok Masyarakat Pemanfaat (KMP) dalam realisasinya benar-benar digunakan sesuai dengan kebutuhan dan keperluannya; (c) kelompok masyarakat pemanfaat yang meminjam dana ekonomi produktif umumnya sudah memiliki jenis usaha yang dikembangkan. Sedangkan faktor penghambat dalam pelaksanaan program PEMP antara lain: (1) belum

ada alokasi dana operasional kepada LEPPM3 yang dibebankan kepada APBN atau APBD sehingga dalam menjalankan aktivitasnya menggunakan dana dari penyisihan dana program PEMP; (2) belum optimal dukungan kebijakan pemerintah daerah atas pembinaan petugas teknis terkait di lapangan dan dana operasional, dan cenderung hanya berupa dukungan moral; (3) adanya kemacetan dan tertundanya pengembalian dana ekonomi produktif PEMP 2014 sehingga proses perguliran dana menjadi terhambat.

DAFTAR RUJUKAN

- Bogdan, Robert C & Taylor 1990. *Introduction To Qualitative Research Methods*. Alih Bahasa Arief Furchan. Surabaya: Usaha Nasional.
- Bryant, Coralie dan White, Louise G. 1987. *Manajemen Pembangunan: Untuk Negara Berkembang*. Alih bahasa Rusyanto L. Simatupang, Jakarta: LP3ES.
- Cernea, Michael., ed. 1988. *Mengutamakan Manusia di Dalam Pembangunan: Variabel-Variabel Sosiologi di Dalam Pembangunan Pedesaan*. Alih Bahasa Basilius Bengo Teku. Jakarta: UI Press.
- Chambers, Robert. 1987. *Pembangunan Desa Mulai Dari Belakang*. Alih Bahasa Pepet Sudradjat, Jakarta: LP3ES.
- Conyers, Diana. 1991. *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga*. Diterjemahkan oleh: Susetawan. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Coser, Lewis A. 1956. *The Functions of Social Conflict*. New York: The

- Free Press.
- Faisal, Sanafiah. 1995. *Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar dan Aplikasi*. Malang: Yayasan Asah-Asih-Asuh.
- Esman, Milton J. 1991. *Management Dimensions of Development: Perspectives and Strategies*. West Hartford. Connecticut. Kumarian Press.
- Esman, Milton J and Uphoff, Norman T. 1984. *Local Organizations: Intermediaries in Rural Development*. Ithaca: Cornell University Press.
- Friedman, John. 1992. *Empowerment: The Politics of Alternative Development*. Cambridge. Massachusetts: Blackwell Publishers.
- Grindle, Merilee S (ed). 1980. *Politics and Public Implementation in the Third World*. New Jersey: Princeton University Press.
- Hikmat, Harry 2001. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, Bandung: Humaniora Utama Press.
- Kaplan, Bernard. 1967. "The culture of Poverty: The Moral Perspective", in *Journal of Human Relations*. Vol 15.
- Kartasasmita, Ginandjar. 1997. *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, Jakarta : PT. Pustaka Cidesindo.
- Korten, David C. 1984. *Pembangunan Yang Memihak Rakyat: Kupasan tentang Teori dan Metode Pembangunan*. Alih Bahasa Nirwono. Jakarta: Lembaga Studi Pembangunan.
- _____. 1986. *Community Development : Asian Experience and Perspective*. Connecticut. Kumarian Press.
- _____. 1992. *Menuju Abad ke-21. Tindakan Sukarela dan Agenda Global. Pendahuluan: Kita Menghadapi Masalah*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Korten, David C. and Felipe B. Alfonso (ed.). 1983. *Bureaucracy and the Poor: Closing the Gap*. Connecticut. Kumarian Press.
- Korten, David C. and Rudi Klaus (eds.). 1984. *People Centered Development: Contribution toward Theory and Planning Frameworks*. USA : Kumarian Press.
- Koentjaraningrat. 1991. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.
- Lele, Uma. 1975. *The Design of Rural Development*. Washington D.C : Johns Hopkins University Press.
- Lincoln Y. S. & Guba E. G. 1985. *Naturalistic Inquiry*. Beverly Hill: Sage Publications.
- Martodirdjo, Harjo S. 1991. *Metode Penelitian Ilmu Sosial : Bahan kuliah*, Bandung: Program Pascasarjana UNPAD.
- Miles, Matthew B. & Huberman, A. Michael. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Mouzelis, Nicos P. 1982. *Organization and Bureaucracy: An Analysis of Modern Theories*. Chicago: Aldine Publishing Company.
- Oakley, Peter and Marsden, David. 1984. *Approaches to Participation in Rural Development*. Geneva: International labour Office.
- Pranarka dan Vidhyandika M. 1996. *Pemberdayaan, dalam Onny S.P. dan A.M.W. Pranarka (ed). 1996. Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*,

- Jakarta : CSIS
- Paul, S. 1987. *Community Participation in Development Project*, London: World Bank.
- Pranarka dan Vidhyandika M. 1996. Pemberdayaan, dalam Onny S.P dan A.M.W. Pranarka (ed). 1996. *Pemberdayaan : Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, Jakarta: CSIS.
- Rustianto, Acil. 2003. *Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Keberhasilan Pelaksanaan Program Pemberdayaan (Survey Ditiga Desa Nelayan Kecamatan bangkoaten Rukan Hilir Provinsi Riau)*. Tesis S2, Bandung: Program Pascasarjana UNPAD.
- Soedjatmoko. 1984. *Pembangunan dan Kebebasan*. Jakarta: LP3ES.
- Sumaryadi, I. Nyoman. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom & Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta : Citra Utama.
- Sumudiningrat, Gunawan, 1999. *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial*, Jakarta : Gramedia.
- Tjiptoherijanto, Prijono dan Yumiko M. Prijono. 1983. *Demokrasi di Pedesaan Jawa*. Jakarta: Sinar Harapan dan Lembaga Penerbit FE UI.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 1985. *Perencanaan Pembangunan*, Jakarta: PT. Gunung Agung.
- Tjokrowinoto, Moeljarto. 1987. *Politik Pembangunan: Sebuah Analisis, Konsep, Arah dan Strategi*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana.
- _____. 1992. "Birokrasi Pembangunan Masyarakat", dalam Sofian Effendi, Sjafri Sairin, M. Alwi Dahlan (ed.) *Membangun Martabat Manusia :* *Peranan Ilmu-Ilmu Sosial Dalam Pembangunan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Thoha, Muhamad. 1987. *Birokrasi Modern*. Jakarta : PT. Rajawali Press.
- Todaro, Michael P. 1987. *Economic Development in the Third World*. New York : Longman.
- Ulhaq, Ahmedi. 1983. Rethinking Empowerment. *Journal of Progressive Human Service* Vol.1. 27-39.
- World Bank. 1975. *Rural Development Sector Policy Paper*, Washington D.C: The World Bank.